

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Gerakan Pangan Murah dalam mencapai tujuannya. Yang mana tujuan dari program GPM ini sudah tertuang jelas di dalam petunjuk teknis (Juknis) GPM yang dikeluarkan oleh Bapanas, yaitu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta meningkatkan aksesibilitas dan daya beli masyarakat terhadap pangan pokok. Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Gerakan Pangan Murah di Kota Padang telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari enam variabel implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas penyelenggaraan, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Keberhasilan implementasi Program Gerakan Pangan Murah terutama didukung oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, sehingga seluruh pelaksana memiliki pedoman yang sama dalam melaksanakan program. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara Badan Pangan Nasional, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Perum BULOG, Toko Tani Indonesia Center (TTIC), distributor, pelaku UMKM, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan turut mendukung kelancaran pelaksanaan program. Komitmen para

pelaksana yang ditunjukkan melalui pembagian tugas yang jelas, tanggung jawab, serta konsistensi dalam melaksanakan kegiatan juga menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan implementasi Program Gerakan Pangan Murah.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling membatasi keberhasilan implementasi adalah keterbatasan ketersediaan komoditas pangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah. Keterbatasan tersebut menyebabkan komoditas sering habis sebelum seluruh masyarakat memperoleh manfaat program sehingga fungsi GPM sebagai instrumen intervensi pasar belum dapat berjalan secara optimal. Selain itu, cakupan pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah yang belum merata di seluruh wilayah Kota Padang menyebabkan manfaat program belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Program Gerakan Pangan Murah di Kota Padang lebih banyak ditentukan oleh aspek kelembagaan, yaitu kejelasan standar kebijakan, koordinasi antar organisasi, dan komitmen pelaksana. Sementara itu, keterbatasan komoditas pangan strategis serta cakupan pelaksanaan yang belum merata menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, meskipun implementasi Program Gerakan Pangan Murah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, peningkatan ketersediaan komoditas pangan strategis dan perluasan jangkauan pelaksanaan program menjadi aspek yang perlu diprioritaskan agar tujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dapat tercapai secara lebih efektif.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang perlu meningkatkan perencanaan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Padang yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di masa mendatang, yaitu:

1. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang perlu memperbaiki perencanaan kebutuhan komoditas sebelum pelaksanaan GPM. Perencanaan tidak hanya didasarkan pada jenis komoditas yang akan disediakan, tetapi juga pada estimasi jumlah masyarakat sasaran, tingkat permintaan pada masing-masing lokasi, serta kondisi perkembangan harga pangan. Langkah ini diperlukan agar jumlah komoditas strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah, lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat kegiatan berlangsung.
2. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang perlu memperkuat kerja sama dengan mitra penyedia komoditas pangan. Koordinasi dengan Perum BULOG, TTIC, distributor, pelaku usaha, dan mitra pangan lainnya perlu dilakukan sejak tahap perencanaan dengan menyepakati kebutuhan, jumlah pasokan, waktu pengiriman, dan kemampuan penyediaan komoditas. Penguatan kerja sama tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko keterbatasan stok pada saat pelaksanaan GPM.

3. Pemerintah Kota Padang perlu memperluas cakupan pelaksanaan GPM secara lebih terarah. Penentuan lokasi pelaksanaan perlu mempertimbangkan perkembangan harga pangan, jumlah penduduk, tingkat kebutuhan masyarakat, serta wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan dengan harga terjangkau. Perluasan jangkauan tersebut diharapkan dapat meningkatkan cakupan manfaat GPM sehingga intervensi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pada lokasi kegiatan, tetapi dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap stabilitas harga pangan di Kota Padang.
4. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan GPM. Evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga berdasarkan ketersediaan dan jumlah komoditas yang tersalurkan, jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat, kesesuaian harga GPM dengan harga pasar, serta kondisi harga komoditas sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan dan lokasi pelaksanaan GPM berikutnya.